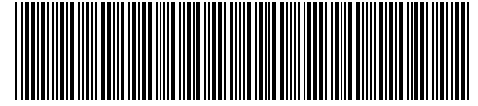




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099239/2026**



DS:1209-3225-9678-6421

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
  2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
  3. Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
  4. Kode>Nama Satker : (099239) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
- Sebesar : Rp. 447.850.000 ( EMPAT RATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang  
Rp. 447.850.000  
Rp. 447.850.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	447.850.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PONTIANAK (042) Rp. 447.850.000

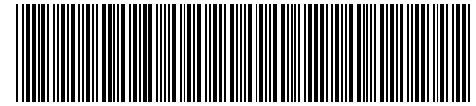
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
LUKY ALFIRMAN  
NIP. 197003271995031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099239/2026  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1209-3225-9678-6421

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (099239) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Halaman : I A. 1

Program	: 005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	447.850.000
Kegiatan	: 1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	447.850.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	
	: 2. 01	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Banding Yang diselesaikan Tepat Waktu	
	: 3. 01	Jumlah SDM Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	
	: 4. 01	Jumlah kegiatan koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Umum	
	: 5. 01	Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Umum	
	: 6. 01	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Umum	
	: 7. 02	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	
	: 8. 02	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Pertama Yang diselesaikan Tepat Waktu	
	: 9. 02	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung dilingkungan Peradilan Umum	
	: 10. 03	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	
	: 11. 04	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
	: 12. 05	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
	: 13. 06	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
	: 14. 07	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	
	: 15. 08	Jumlah Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan eksekusi putusan perdata pada lingkungan peradilan umum	
	: 16. 09	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	
	: 17. 10	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara yang berhasil melalui mediasi	
	: 18. 11	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara anak yang berhasil melalui diversi	
	: 19. 12	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian perkara perdata yang menggunakan e-Court	
	: 20. 13	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099239/2026  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1209-3225-9678-6421

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (099239) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Halaman : I A. 2

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

- 21. 14 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)
- 22. 15 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi upaya hukum banding perkara perdata di pengadilan yang menggunakan e-Court

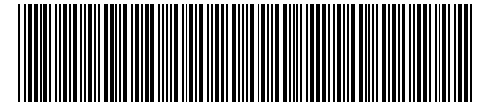
Klasifikasi Rincian Output	1	:	1049.AEA	Koordinasi		3,00	kegiatan		10.000.000
Rincian Output		:	01	AEA.001	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	3,00	kegiatan		10.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan		930,00	Perkara, Berkas Perkara		387.100.000
Rincian Output		:	01	BCA.U08	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	800,00	Perkara		270.100.000
		:	02	BCA.U09	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	80,00	Perkara		72.000.000
		:	03	BCA.U10	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	50,00	Perkara		45.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		180,00	Orang		48.000.000
Rincian Output		:	01	QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum (PN)	180,00	Orang		48.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan		5,00	Perkara, Berkas Perkara		2.750.000
Rincian Output		:	01	QCA.002	Sidang di luar Gedung Pengadilan (PN)	5,00	Perkara		2.750.000

Jakarta, 01 Desember 2025  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099239/2026  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



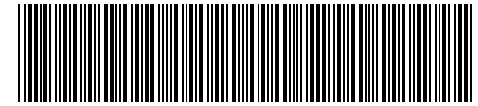
DS:1209-3225-9678-6421

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (099239) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
099239	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	-	447.850	-	-	-	447.850		
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	447.850	-	-	-	447.850		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	447.850	-	-	-	447.850		
1049.AEA	Koordinasi (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	10.000	-	-	-	10.000	13 . 51	
01	RM	-	10.000	-	-	-	10.000	042	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	387.100	-	-	-	387.100	13 . 51	
01	RM	-	387.100	-	-	-	387.100	042	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	48.000	-	-	-	48.000	13 . 51	
01	RM	-	48.000	-	-	-	48.000	042	
1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	2.750	-	-	-	2.750	13 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099239/2026  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1209-3225-9678-6421

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (099239) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK  
Kewenangan : (KD)

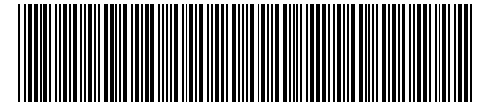
Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	2.750	-	-	-	2.750	042	
<b>JUMLAH</b>		-	447.850	-	-	-	447.850		

Jakarta, 01 Desember 2025  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099239/2026  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1209-3225-9678-6421

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (099239) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	099239	<b>PENGADILAN NEGERI PONTIANAK</b>														
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.462	447.850
		<b>BELANJA BARANG</b>	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.462	447.850
	005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.462	447.850
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.462	447.850
		<b>PERKIRAAN PENERIMAAN</b>	11.706	11.706	11.706	11.706	11.706	11.706	11.706	11.706	11.706	11.706	11.706	11.706	11.708	140.474
		- PNBP (425232)	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	8.280
		- PNBP (425233)	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.426	41.145
		- PNBP (425239)	7.587	7.587	7.587	7.587	7.587	7.587	7.587	7.587	7.587	7.587	7.587	7.587	7.592	91.049

Jakarta, 01 Desember 2025  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099239/2026  
IV A. B L O K I R**



DS:1209-3225-9678-6421

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT  
Kode dan Nama Satker : [099239] PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099239/2026  
IV B. C A T A T A N**



DS:1209-3225-9678-6421

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT  
Kode dan Nama Satker : [099239] PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002